



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN 2022



**SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN BERAU**

## KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja secara berkala. LKj-IP yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Kabupaten Berau agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503708

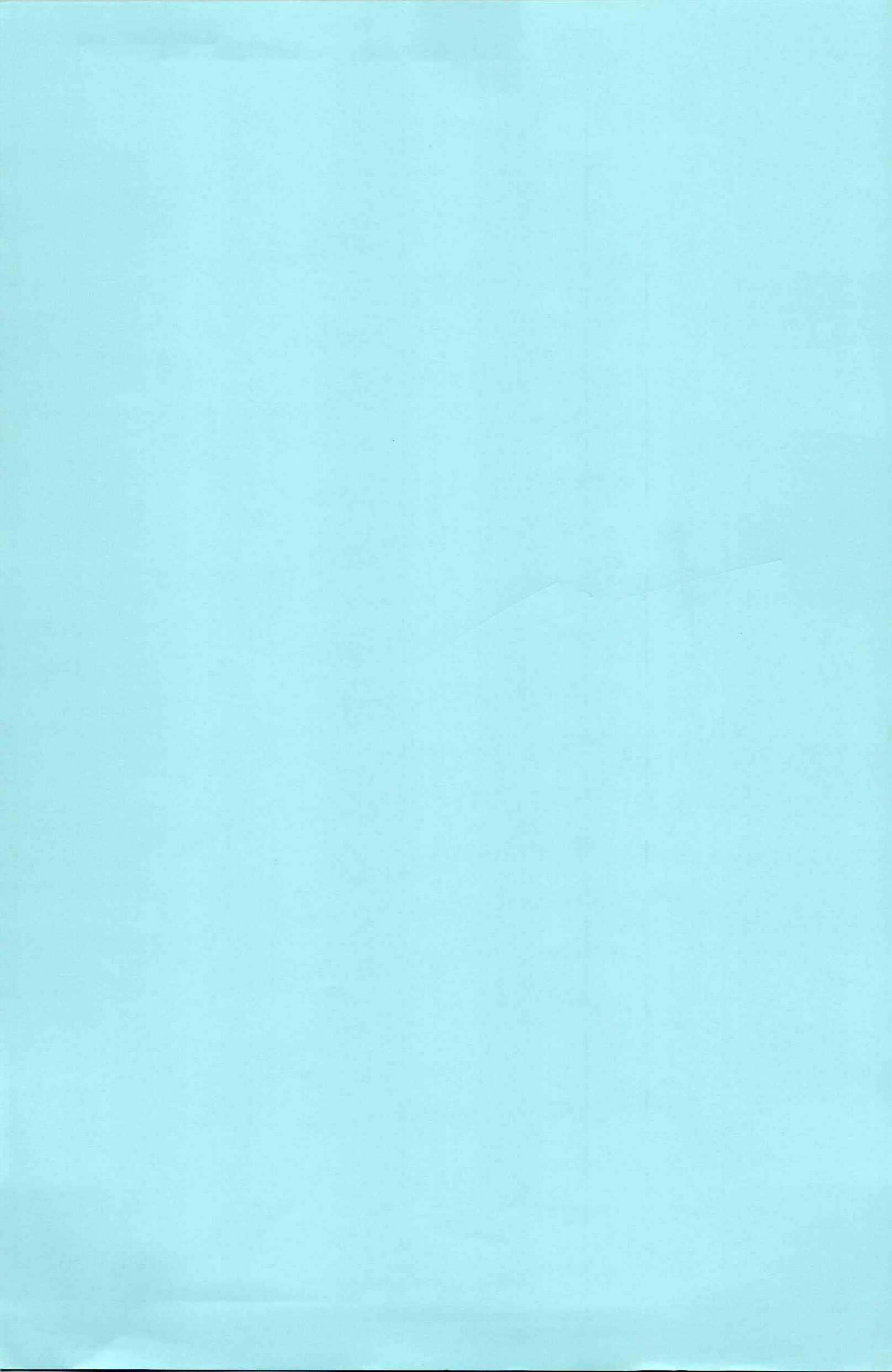
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Berau terdapat 2 (dua) Program, 15 (lima belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan.

Demikian LKj-IP ini disusun semoga dapat menjadi tolok ukur perencanaan, pencapaian program kinerja, sasaran dan pencapaian tujuan pada tahun yang akan datang.

Tanjung Redeb, 20 Pebruari 2023  
Sekretaris DPRD Kabupaten Berau



**H. Abdurrahman, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650202 19890 1 001



## IHKTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bentuk penerapan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

LKj-IP ini memberikan gambaran tentang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 yang diformulasikan dari hasil kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode 2021-2026. Dalam Kurun waktu 2 (dua) tahun pelaksanaan Renstra, beberapa capaian-capaian yang diraih dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Disamping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap bagian-bagian dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau.

LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

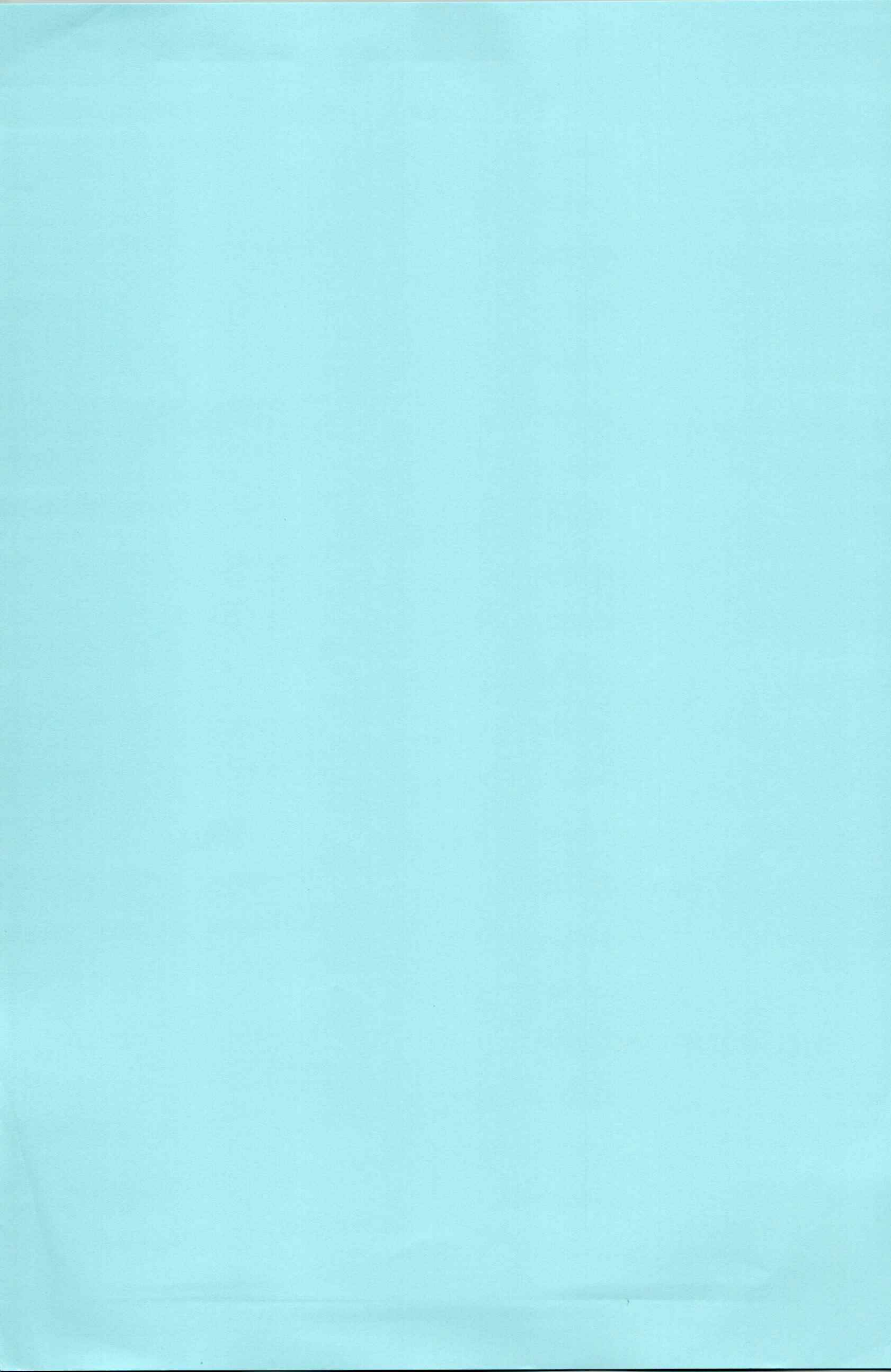
Secara umum dapat kami jelaskan terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yang terdiri atas 2 (dua) program yang tertuang dalam 15 (lima belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan. Dari Sasaran strategis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022 dapat dikategorikan Sangat Berhasil atau 96,7.

Tabel 1  
Hasil capaian sasaran strategis  
Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata capaian kinerja	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	28	90.5%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	22	BB	Baik

Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau serta dukungan dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau.

Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. Sekilas tentang DPRD Kabupaten Berau.....	2
1.3. Profil singkat Anggota DPRD .....	12
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	13
1.5. Struktur Organisasi .....	14
1.6. Sumber Daya Manusia .....	15
1.7. Isu Strategis yang dihadapi organisasi.....	20
1.8. Dasar Penyusunan LKIP .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis .....	23
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	26
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	27
2.4. Perjanjian Kinerja (PK) .....	31
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Akuntabilitas Kinerja .....	37
3.2. Tandaklanjut evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.....	37
3.3. Metode Pengukuran .....	41
3.4. Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran .....	42
3.5. Capaian kinerja perangkat daerah.....	43
3.6. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	44
3.7. Realisasi Anggaran .....	101
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	107



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Berau dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai posisi vital dan strategis dalam konstelasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara spesifik, kesuksesan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawsan tidak dapat dilepaskan dari dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD. Sekretaris DPRD juga mengambil peran yang unik dimana sekretaris DPRD harus mampu menjembatani pemerintah daerah dan DPRD sekaligus menjadi katalisator penguatan performa DPRD.

Pada Tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melaksanakan 2 (dua) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 50 (Lima puluh) sub kegiatan yang wajib yang direalisasikan sesuai target kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja antara

Sekretaris DPRD Kabupaten Berau selaku Pihak pertama dengan Bupati Berau selaku Pihak kedua dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Berau berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Target kinerja jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja maka setiap akhir tahun Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj-IP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

### 1.3 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

#### 1. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. ;

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

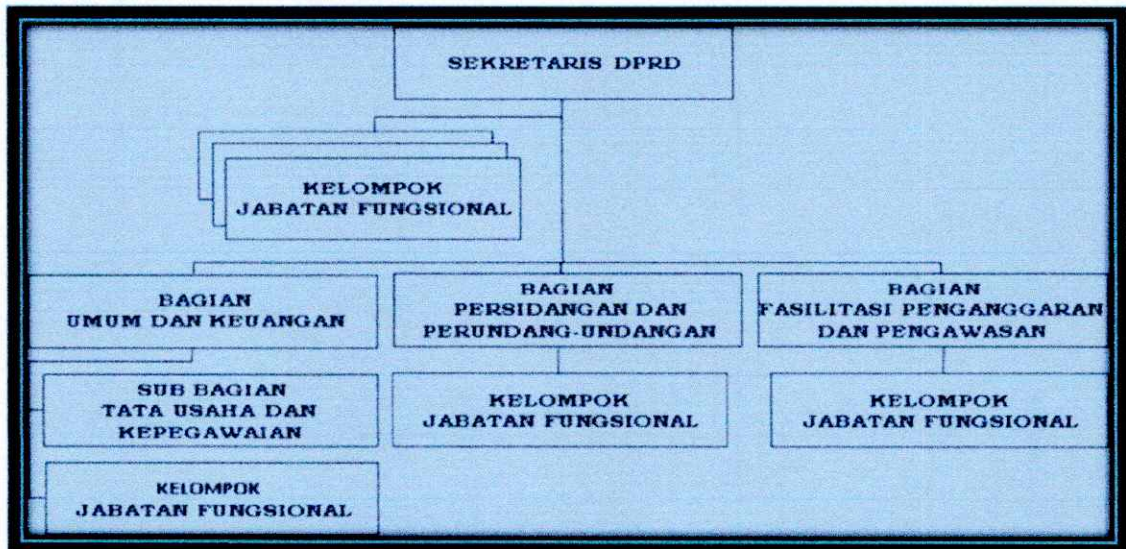
### 1.4 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR 40 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
 TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau



**1.5 Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Suatu hal yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi dan merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60 (enam puluh) orang.

Tabel 2  
Jumlah PNS berdasarkan Golongan/ruang

No	Golongan	Ruang	Jumlah
1	Juru Muda	I a	-
2	Juru muda tingkat I	I b	-
3	Juru	I c	-
4	Juru tingkat I	I d	2
5	Pengatur muda	IIa	-
6	Pengatur muda tingkat I	IIb	
7	Pengatur	IIc	7
8	Pengatur Tingkat I	IId	18
9	Penata Muda	IIIa	12
10	Penata Muda Tingkat I	IIIb	9
11	Penata	IIIc	7
12	Penata Tingkat I	IIId	4
13	Pembina	IVa	3
14	Pembina Tingkat I	IVb	1
15	Pembina Utama Muda	IVc	1
	<b>Jumlah</b>		<b>60</b>

Dari data di atas PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Berdasarkan Golongan/Ruang, golongan terbanyak adalah golongan III sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang kemudian diikuti oleh golongan II sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, golongan IV sebanyak 5 (lima) orang dan golongan I sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel 3  
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1	SD	
2	SMP	2
3	SMA	27
4	Diploma III/IV	5
5	S1	17
6	S2	9
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>

Tingkat Pendidikan PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022 terdiri dari jenjang S2 sebanyak 9 (sembilan) orang, jenjang S1 sebanyak 20 (dua puluh) Orang, Diploma III/IV sebanyak 5 (lima) orang, SLTA sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Tabel 4  
Jumlah PNS berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	3
3	Eselon IV a	1
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>

Jumlah PNS yang menduduki eselon di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau Tahun 2022 terdiri dari eselon II b sebanyak 1 orang, eselon III a sebanyak 3 orang, dan eselon IV a sebanyak 1 orang.

Tabel 5  
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Pim	Sudah Diklat	Belum Diklat	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	1	-	1
2	Diklat	3	-	3

	Kepemimpinan Tingkat III			
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	5	4	9
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>13</b>

Tabel 6  
Jumlah Tenaga Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)  
Berdasarkan pendidikan

No	PENDIDIKAN	Jumlah
1	SD	2
2	SMP	3
3	SLTA	30
4	DIPLOMA	-
5	S1	7
	<b>JUMLAH</b>	<b>42</b>

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau didukung oleh 42 orang. Berdasarkan pendidikan S1 sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 30 orang, SMP 3 orang dan SD 2 orang.

### 1.7 Isu Strategis Yang Dihadapi Organisasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

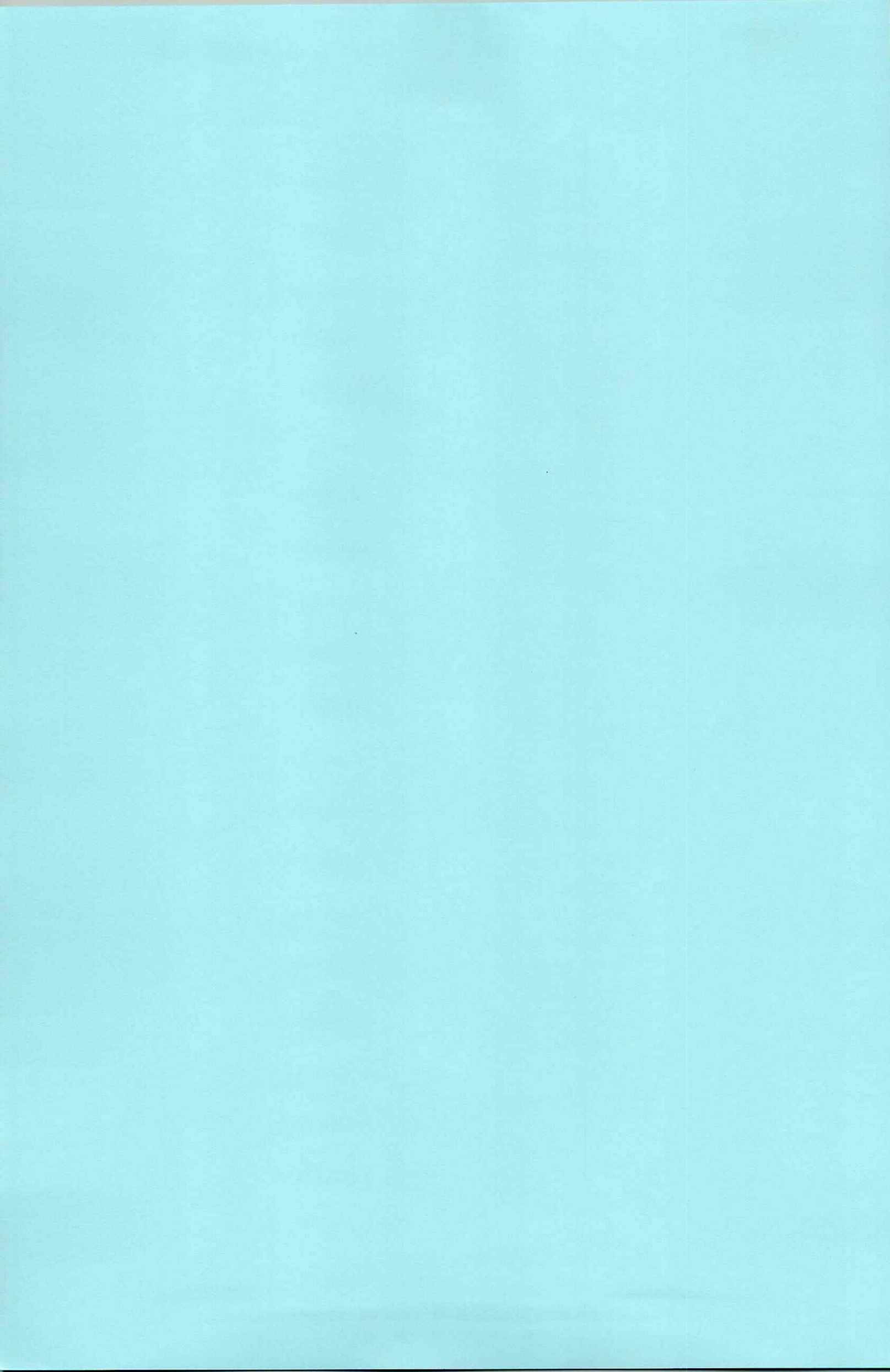
Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain :

1. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi.
3. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.
4. Keterlambatan materi Raperda dan dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
5. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
6. Terkadang terjadi hubungan yang kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

#### 1.8 Dasar Hukum Penyusunan LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022.

Dasar hukum dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
3. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau



## BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau 2021-2026 merupakan penjabaran sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan OPD selama periode 5 (lima) Tahun ke depan (2021-2026) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Berau.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau.

Tujuan dan sasaran

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 7  
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Terwujudnya optimalisasi fasilitasi pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Berau	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Persentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD selesai tepat waktu
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melakukan beberapa perubahan sebagaimana hasil reviu tim Inspektorat Kabupaten Berau terkait Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RENSTRA maka perlu dilakukan beberapa point revisi dalam rangka perbaikan yaitu:

1. Dilakukan reviu secara berkala terhadap Dokumen Renstrapada kegiatan perencanaan kinerja

2. Melakukan penetapan IKU secara eksplisit (disajikan terpisah) dengan penetapan target kinerja yang dapat diukur
3. Melakukan evaluasi program terhadap pencapaian kinerja beserta hambatannya.

Tabel 8  
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ formula penghitungan	TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	%	Hasil Survey kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Berau terhadap elayanan Sekretariat DPRD kabupaten Berau	60	65	70	75	80	85
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP	Nilai hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun yang lalu	B	BB	BB	A	A	A

### 2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja (*Performance Plan*) menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau selama tahun berjalan dan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Target kinerja pada tingkat sasaran merupakan *brenchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan tujuan sedangkan untuk tingkat kegiatan didefinisikan untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi rencana strategik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan.

Berdasarkan Anggaran murni dan perubahan Tahun 2022 ada 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan. Sasaran dan indikator kinerja pada tingkat sasaran beserta targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 9  
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.958.955.923
		Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA	103.359700

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2022

		perangkat daerah yang disusun dengan baik		PERANGKAT DAERAH	
		Jumlah dokumen yang disusun	10	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	90.859.800
		Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.499.900
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.311.810.061
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	61	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.811.994.349
		Jumlah Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dibayarkan	121	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.499.815.712
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.363.950.400
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	285	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	103.970.000
		jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Per Undang-Undangan	30	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.259.980.400
		Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersedia		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.973.971.000
		Jumlah penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	54.570.000
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	749.751.200
		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	12.965.000
		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor	3	Penyediaan bahan logistik kantor	320.943.000
		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.933.800

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2022

		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	99.999.600
		Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	224	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	685.748.400
		<b>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.759.035.600</b>
		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Penyediaan surat menyurat	4.459.000
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	803.040.000
		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	175.496.700
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	15	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	776.039.100
		<b>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.239.626.200</b>
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	709.996.200
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	219.970.000
		Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	1	Pemeliharaan /rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	150.000.000
		Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	Pemeliharaan aset tetap lainnya	159.660.000
		<b>Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>	<b>18.144.379.018</b>
		Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	17.254.576.818
		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	150	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	237.352.400
		Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up	30	Pelaksanaan medical check up	652.449800

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2022

		DPRD		DPRD	
		Prosentase Layanan Administrasi DPRD		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	4.840.867.400
		Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	424	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	3.590.889.000
		Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	1.249.978.400
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.221.956.544
		Persentase pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	3.198.716.700
		Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.198.716.700
		Persentase Pembahasan kebijakan anggaran		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	2.342.942.100
		Pembahasan KUA dan PPAS		Pembahasan KUA dan PPAS	100.989.600
		Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.989.600
		Jumlah rapat Pembahasan APBD		Pembahasan APBD	1.282.988.000
		Jumlah rapat Pembahasan APBD Perubahan		Pembahasan APBD Perubahan	564.992.200
		Jumlah rapat Pembahasan Laporan semester		Pembahasan Laporan semester	42.989.000
		Jumlah rapat Pembahasan pertanggungjawaban		Pembahasan pertanggungjawaban	249.993.700
		Persentase peningkatan kapasitas DPRD		PENINGKATAN KAPASITAS	3.882.168.144

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2022

DPRD					
		Orientasi DPRD		Orientasi DPRD	20.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis		Pendalaan Tugas DPRD	1.379.418.000
		Publikasi dan dokumentasi dewan		Publikasi dan dokumentasi dewan	1.319.957.400
		Jumlah Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	199.999.400
		Penyediaan tenaga ahli fraksi		Penyediaan tenaga ahli fraksi	458.928.444
		Jumlah Penyelenggaraan hubungan masyarakat		Penyelenggaraan hubungan masyarakat	323.907.800
		Jumlah Penyusunan program kerja DPRD		Penyusunan program kerja DPRD	179.957.100
		<b>Persentase pemyerapan penghimpunan aspirasi masyarakat</b>		<b>PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT</b>	<b>3.605.475.300</b>
		Jumlah kunjungan dalam daerah		Kunjungan kerja dalam daerah	580.749.800
		Jumlah Penyusunan pokok-pokok ikiran DPRD	1	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	24.999.300
		Jumlah Pelaksanaan reses		Pelaksanaan reses	2.999.726.200
		<b>Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik</b>		<b>PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD</b>	<b>199.559.300</b>
		Jumlah pengawasan Pengawasan kode etik DPRD		Pengawasan kode etik DPRD	199.559.300
		<b>Persentase fasilitasi tugas DPRD</b>		<b>FASILITASI TUGAS DPRD</b>	<b>3.993.095.000</b>
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	2.997.360.500
		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah		Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	699.400.700
		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi tugas impinan DPRD		Fasilitasi tugas impinan DPRD	296.333.800

## 2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja 2022 adalah suatu pernyataan kinerja sasaran yang harus dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam Tahun 2022. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 10  
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD  
Kabupaten Berau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Indeks	70
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekrretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP	BB

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2022 terdapat 2 (dua) sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

Sasaran strategis ini diukur dengan Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Sasaran strategis ini diukur dengan Indeks Kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Berau



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan penunjang kesekretariatan DPRD.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat di lihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

## 1.2. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi terhadap kinerja dengan menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022 meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 yang berorientasi pada Sasaran, Indikator dan Target Kinerja serta memperhatikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Inspektorat Kabupaten Berau. Dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, memuat beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut :

1. Mereviu Renstra secara berkala dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi).

*Secara berkala melakukan reviu terhadap dokumen Renstra Sekretariat DPRD dengan memperhatikan perubahan-perubahan dan progres dalam pelaksanaan Program dan kegiatan.*

2. Mengupload Dokumen Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Laporan Kinerja, Rencana Aksi ke dalam *website* Sekretariat DPRD.

*Pada awal Tahun 2022, kami sudah mengupload dokumen Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Laporan Kinerja, Rencana Aksi ke dalam website Sekretariat DPRD.*

3. Menjabarkan target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA).

Rencana atau Perjanjian Kinerja Tahunan harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/PK terkait dengan (disebabkan oleh) capaian target-target Rencana Aksi. Atau antara RKT/PK memiliki hubungan kausalitas dengan Rencana Aksi.

*Dalam penyusunan Rencana Aksi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menjabarkan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Renja Sekretariat DPRD.*

4. Agar monitoring kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sebagai berikut :

- Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya
- Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya
- Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang terbaru (*up dated performance*)
- Terdapat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Evaluasi terhadap capaian target kinerja menjadi perhatian utama dalam perbaikan-perbaikan SAKIP Sekretariat DPRD, baik terhadap Perjanjian Kinerja, Rencana aksi maupun Rencana kerja.

Dalam implementasi dan mekanisme untuk *punishment* bagi pegawai yang terlambat masuk kerja dilakukan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan PNS. Dan untuk implementasi *reward* belum ditetapkan mengingkat belum ada

kekentuan yang mengatur tentang pemberian reward bagi PNS.

5. Agar pemanfaatan Rencana Aksi memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan meliputi kriteria sebagai berikut :
  - Target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;
  - Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output kegiatan;
  - Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan;
6. Memenuhi kriteria pengumpulan data (capaian) kinerja yang dihasilkan agar dapat diandalkan. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan : Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data valid); Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal;
7. Seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester)
8. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

9. IKU yang ditetapkan dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran : Dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja; Dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA)
10. Membuat *reward* dan *punishment* untuk seluruh jabatan setingkat eselon IV keatas yang sebanding (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) kerjanya. Hasil pengukuran dikatakan terkait dengan *reward & punishment* apabila terdapat perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat *reward & punishment* antara : pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kerjanya); pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target; pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai); pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar
11. Merevisi IKU dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovatif);
12. Memanfaatkan hasil pengukuran Rencana Aksi (RA) sebagaimana seluruh kriteria yang ditetapkan. Kriteria digunakan untuk pengendalian dan pemantauan : Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja; Hasil pengukuran RA menjadi dasar

- (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan; Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
13. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan besaran efisiensi tersebut dapat dikuantifikasikan.
  14. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan. Telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan artinya : informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur
  15. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam peningkatan kinerja. telah digunakan untuk peningkatan kinerja artinya : terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam Laporan Kinerja ( termasuk Laporan Kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya
  16. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam penilaian kinerja. telah digunakan untuk penilaian kinerja, artinya: informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment*
  17. Hasil evaluasi disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil

evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan tsb secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti;

18. Melakukan pemantauan atas Rencana aksi secara bulanan;
19. Membuat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan sebagian alternatif yang diberikan
  - Menunjukkan hasil evaluasi rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap triwulan
  - Menindaklanjuti rekomendasi yang terkait dengan perencanaan hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
  - Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata

### 3.3 Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasi sebagai berikut :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kineja} = \frac{\text{Rencana-(Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

### 3.4 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 11 Skala pengukuran

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	Berhasil
55 < X ≤ 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini: Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (*rata-rata*) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\frac{\text{Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}$$

---

Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

### 3.5 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten berau tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 12  
Capaian Kinerja Tahun 2022  
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	65	68
2	Meningkatnya	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BB	BB

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Sekretariat DPRD Kabupaten Berau			
---	---	--	--	--

- Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Perjanjian Kinerja untuk sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah BB.
- Sedangkan capaian untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau 68%

Tabel 13  
Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	65	68
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	BB	BB

	DPRD Kabupaten Berau	Kabupaten Berau			
--	----------------------	-----------------	--	--	--

### 3.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

#### 3.6.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 14

Realisasi Rencana Kerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022		Satuan
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten	65	68	%

		Berau			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekretriati DPRD Kabupaten Berau	BB	BB	Nilai SAKIP

1.6.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 15  
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2021 dan 2022  
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	60	62	65	68
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekretriati DPRD Kabupaten Berau	B	B	BB	BB

1.6.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 16  
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2017 s/d 2022  
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	50	56	55	58	58	60	60	63	62	65	65	68
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	C	C	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2022 mempunyai target sebesar 65 dan realiasi 68 Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan adanya peningkatan pencapaian kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, antara lain :

- Komitmen pimpinan
  - Dukungan Anggaran yang memadai
  - Peningkatan kapasitas SDM
  - Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
  - Kerjasama yang baik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dengan Nilai SAKIP BB.

**1.6.4 Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

- Sasaran I  
Sasaran I terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan. Sembilan kegiatan ini merupakan penunjang atau operasional sekretariat. Capaian sasaran I mendapatkan nilai rata-rata 90.5%.

Tabel 17  
Sasaran I:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

No	Program dan Kegiatan	Target	Satuan	Ralisasi	%
	Sekretariat DPRD				
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>90,5</b>
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>50</b>
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dokumen	10	100
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	orang	0	0
<b>2</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>				<b>100</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61	orang	61	100
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121	orang	121	100
<b>3</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>				<b>74</b>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2022

1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	285	stel	278	97
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	kali	0	0
3	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	11	orang	14	127
<b>4</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>				<b>118</b>
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10	jenis	22	220
2	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	66	unit	129	195
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	6	jenis	7	116
4	Penyediaan bahan logistik kantor	5	jenis	5	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20	jenis	20	100
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	jenis	2	100
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	224	kali	224	100
<b>5</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>100</b>
1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	9	unit	9	100
<b>6</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>100</b>
1	Penyediaan surat menyurat	200	lembar	200	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	12	100
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	40	jenis	40	100
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	15	orang	15	100
<b>7</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>100</b>
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	48	unit	48	100
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10	unit	10	100
3	Pemeliharaan /rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	1	gedung	1	100
4	Pemeliharaan asset tetap lainnya	1	gedung	1	100
<b>8</b>	<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>				<b>73</b>
1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	12	bulan	12	100

2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD27	180	stel	180	100
3	Pelaksanaan medical check up DPRD	30	orang	21	70
9	<b>LAYANAN ADMINISTRASI DPRD</b>				<b>100</b>
1	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12	kali	12	100
2	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	3	pimpinan	3	100

Tabel 18  
Sasaran II :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka  
Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Target	Satuan	Ralisasi	103
1	<b>PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD</b>				<b>126</b>
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	30	Kali	38	126
2	<b>PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN</b>				<b>112</b>
1	Pembahasan KUA dan PPAS	9	Kali	9	100
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6	Kali	7	116
3	Pembahasan APBD	25	Kali	29	116
4	Pembahasan APBD Perubahan	6	Kali	8	133
5	Pembahasan Laporan semester	1	Kali	1	100
6	Pembahasan pertanggungjawaban	27	Kali	29	107
3	<b>PENINGKATAN KAPASITAS DPRD</b>				<b>87</b>
1	Orientasi DPRD	1	orang	0	0
2	Pendalaman Tugas DPRD	3	kali	4	133
3	Publikasi dan dokumentasi dewan	1	Dokumen	1	100
4	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	5	orang	5	100
5	Penyediaan tenaga ahli fraksi	10	orang	10	100
6	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	60	kali	48	80
7	Penyusunan program kerja DPRD	1	dokumen	1	100
4	<b>PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT</b>				<b>94</b>
1	Kunjungan kerja dalam daerah	30	orang	25	83
2	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	1	dokumen	1	100

3	Pelaksanaan reses	3	kali	3	100
5	<b>PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD</b>				<b>100</b>
1	Pengawasan kode etik DPRD	1	kegiatan	1	100
6	<b>FASILITASI TUGAS DPRD</b>				<b>103</b>
1	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	500	kali	530	106
2	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	35	kali	30	85
3	Fasilitasi tugas impinan DPRD	5	pimpinan	6	120

Sasaran kedua ini merupakan kegiatan inti Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang terdiri dari kegiatan :

**1. Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang. DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

- 1) Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- 2) Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- 3) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- 4) Mengusulkan:
  - a. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri

- Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
- b. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  - c. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  - d. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
  - 6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
  - 7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - 8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
  - 9) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

Kedudukan, fungsi dan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD menjalankan tugas-tugas di bidang legislatif, sebagai badan perwakilan DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum, salah satu fungsi badan legislatif adalah fungsi pembentukan Perda. Berkenaan dengan fungsi ini, terdapat adanya hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan atas Rancangan Perda.

Tugas utama dari badan legislative dalam hal ini bapemperda adalah di bidang perundang-undangan DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai tugas utama membahas, memusyawarahkan dan menyetujui suatu Perda. Salah satu ukuran keberhasilan atau ukuran produktifitas DPRD ialah didasarkan atas seberapa banyak Perda yang disetujui sesuai dengan kebutuhan daerah yang diwakilinya, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Baru terbentuknya Bapemperda karena adanya pergantian Anggota Dewan Baru yang priode sebelumnya masih menyisakan pembahasan raperda
- 2) Anggaran yang disahkan setelah Progam Legilasi daerah (Prolegda) sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan kurang sinkron dalam penganggarannya sehingga sulusnya agar dalam pengesahan Prolegda sudah terencana dengan baik dalam penggaran sebelum APBD di sahkan.

**PELAKSANAAN KEGIATAN :**

Adapun kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Rapat Gabungan Komisis DPRD Kab. Berau Tgl 4 Januari 2022
2. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 10 Januari 2022
3. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 12 Januari 2022
4. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 13 Januari 2022
5. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau Tgl 18 Januari 2022
6. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau Tgl 25 Januari 2022
7. Rapat Internal Bapemperda DPRD DPRD Kab. Berau Tgl 7 Februari 2022
8. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 14 Februari 2022
9. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 21 Februari 2022
10. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 22 Februari 2022
11. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 14 Maret 2022
12. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 15 Maret 2022
13. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 21 Maret 2022
14. Rapat Internal Bapemperda DPRD DPRD Kab. Berau Tgl 4 April 2022
15. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau Tgl 5 April 2022
16. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 11 April 2022
17. Rapat Internal Bapemperda DPRD DPRD Kab. Berau Tgl 24 Mei 2022
18. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 30 Mei 2022

19. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 6 Juni 2022
20. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 13 Juni 2022
21. Rapat Internal Bapemperda DPRD DPRD Kab. Berau Tgl 6 Juli 2022
22. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 7 Juli 2022
23. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 15 Agustus 2022
24. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau Tgl 12 September 2022
25. Rapat Internal Bapemperda DPRD DPRD Kab. Berau Tgl 20 September 2022
26. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 4 Oktober 2022
27. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 10 Oktober 2022
28. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 18 Oktober 2022
29. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 18 Oktober 2022
30. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 24 Oktober 2022
31. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 25 Oktober 2022
32. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 1 November 2022
33. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 1 November 2022
34. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 8 November 2022
35. Rapat Internal Bapemperda DPRD DPRD Kab. Berau Tgl 21 November 2022

36. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau Tgl 22 November 2022
37. Rapat Konsultasi Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 5 Desember 2022 ( Siang )
38. Rapat Konsultasi Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 5 Desember 2022 ( Malam )

Tabel 19

Raperda yang diusulkan ke DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022

NO	Raperda yang diusulkan ke DPRD Kabupaten berau Tahun 2022
1	Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Raperda Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Kampung
3	Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Pada PT. Indo Pusaka Berau
4	Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5	Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau
6	Raperda tentang Pembangunan Industri Kabupaten Berau Tahun 2021-2041
7	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Dan Kearsipan
8	Raperda tentang Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Raperda tentang Penyelenggaraan KeolahRagaan
10	Raperda tentang Kabupaten Layak Anak
11	Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12	Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan dan

	Gedung
13	Perda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing Dipungut Dari Kompensasi Atas Pengesahan Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan
14	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Tabel 20  
Raperda yang disetujui oleh DPRD  
Kabupaten Berau Tahun 2022

NO	Raperda yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022
1	Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Raperda Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Kampung
3	Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung
4	Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5	Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau
6	Perda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing Dipungut Dari Kompensasi Atas Pengesahan Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan
7	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Dan Kearsipan
8	Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

9	Raperda tentang Kabupaten Layak Anak
10	Raperda tentang Penyelenggaraan KeolahRagaan

## 2. Pembahasan kebijakan anggaran

### a. Latar Belakang

#### ▪ Dasar Hukum

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6) Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

#### ▪ Gambaran Umum

Mempedomani UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 69, bahwa DPRD mempunyai fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.

- b. Kegiatan yang dilaksanakan
  - Uraian kegiatan Kegiatan ini meliputi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Berau bersama Tim TAPD terhadap Ranperda:
    - a. Pembahasan KUA dan PPAS
    - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS c) Pembahasan APBD
    - c. Pembahasan Perubahan APBD
    - d. Pembahasan Laporan Semester
    - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- c. Maksud dan Tujuan
  - Maksud kegiatan Terlaksananya pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2021, Ranperda APBD Tahun 2022, Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021, Pembahasan Laporan Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya Tahun 2022 serta Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.
  - Tujuan kegiatan Terwujudnya penetapan Peraturan Daerah terkait KUA-PPAS Tahun 2022, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2021, APBD Tahun 2022, Perubahan APBD Tahun 2021, Pembahasan Laporan Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.
- d. Indikator Keluaran

- Indikator Keluaran (kualitatif) Terselenggaranya serta meningkatnya kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas oleh Dewan bersama TAPD.
- Keluaran (kuantitatif) Tersedianya biaya operasional pendukung kegiatan pada proses pembahasan hingga penetapan Rancangan Peraturan Daerah.

e. Pelaksanaan Kegiatan

- Metoda pelaksanaan
  - Melakukan Rapat pembahasan dengan TAPD
  - Melaksanakan Konsultasi Awal
  - Melaksanakan Studi Banding
  - Melaksanakan Konsultasi Akhir
- Tahapan kegiatan Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kalender perencanaan Pemerintah Daerah dan agenda Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Berau bersama Pemerintah Daerah.
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan Dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Berau/Luar daerah.

f. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

- Pelaksana kegiatan Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Berau
- Penanggungjawab kegiatan Penanggungjawab kegiatan dimaksud adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau
- Penerima manfaat Pemerintah Daerah Kabupaten Berau

Waktu pelaksanaan kegiatan-Kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Mei-Desember Tahun 2022

### 3. Peningkatan Kapasitas DPRD

Peningkatan Kapasitas DPRD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD Kabupaten /Kota ada dua yaitu :

#### I. Pendalaman Tugas DPRD

- Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
- Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pelaksanaan Pendalaman DPRD Tahun 2023 :
  1. Undangan Fraksi Partai Demokrat dengan Tema Peningkatan Peran Anggota DPRD Dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan daerah di era pandemi dan pasca pandemi tgl 17 sd 20 Maret 2022 Di Jakarta
  2. Biaya kontribusi Mengikuti Teknis Fraksi Partai PAN dengan Tema Membangun Kesiapan Partai Amanat Nasional Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024 Tanggal 29 Maret sd 01 April 2022
  3. Konsolidasi Nasional Fraksi Golkar Se Indonesia dan Bimtek Pemenangan Pemilu 2024 Di Jakarta

4. Workshop Nasional Tahun 2022 Anggota Fraksi HANURA Tingkat DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tema "Menguatkan Tugas,Fungsi Dan Menuntaskan Tanggungjawab Konstitusi
5. Workhop & Penganugerahan PPP Award Anggota Partai Persatuan Pembangunan Seindonesia dengan Tema " Merawat Persatuan dengan Pembangunan"
6. workshop nasional tahun 2022 untuk anggota fraksi HANURA DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta menghadiri ulang tahun (HUT) Partai Hanura yang Ke 16
7. Bimbingan teknis partai nasdem DPRD Propinsi Kabupaten dan Kota tgl 09 Nopember s/ d 12 Nopember Di Jakarta
8. bimbingan teknis Nasional DPRD Fraksi Demokrat Tahun 2022 tgl 10 Nopember s/ d 12 Nopember 2022 Di Jakarta
9. bimbingan teknis Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau Tanggal 27 Nopember s/ d 30 Nopember Di Balikpapan
10. Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan Seluruh Indonesia Di Jakarta
11. Bimbingan Teknis (BIMTEK) Partai Nasdem DPRD Propinsi,Kabupaten dan Kota dengan Tema "Arah Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
12. Undangan Rakornis Bidang PP Wilayah Kalimantan dan Bimtek Legislatif Partai Golkar Tahun 2022 Tgl 17 Juni sd 19 Juni Di Balikpapan
13. Undangan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau dengan Tema "Peningkatan

Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran serta Strategi Penyusunan Rencana Kerja Tgl 23 Juni sd 26 Juni Di Yogyakarta

14. Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis/Workshop Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Se kaltim
15. Bimbingan Teknis Anggota DPRD PKS Se Kalimantan dengan Tema 'Transformasi dan Kolaborasi menuju indonesia Adil dan Sejahtera di Bali

## II. Penyelenggaraan Hubungan masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu inti dari pada pelaksanaan dari Otonomi Daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Salah satu ciri partisipasi politik antara lain adanya input yang berbentuk aspirasi masyarakat yang secara teknis dapat dikatakan sebagai tuntutan atau dukungan. Aspirasi merupakan ungkapan ketidakpuasan atau keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, kritikan, harapan, masukan, dan saran.

Masyarakat pada umumnya berhak menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan hal-hal mengenai pelaksanaan pembangunan, jalannya pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang ada didaerah. Namun, karena banyaknya aspirasi yang masuk sehingga pemerintah mendapatkan kesulitan dalam penyampaian untuk menanggapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Terdapat 2 (dua) aspirasi yang berkembang dimasyarakat, antara lain :

1. Aspirasi langsung adalah merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung tanpa perantara, seperti : aksi unjuk rasa, dimana aksi ini terkadang menjadi sangat tidak terkontrol karena tidak adanya tanggapan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ;
2. Aspirasi tidak langsung adalah merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media, seperti : surat yang disampaikan kepada pemerintah, email yang dikirimkan melalui website dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan hubungan masyarakat (*hearing*) atau rapat dengar pendapat adalah merupakan kegiatan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang harmonis diantara pihak legislatif (anggota DPRD) dengan masyarakat, sehingga DPRD Kabupaten Berau mendapatkan berbagai masukan yang berharga dalam rangka membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan, jalannya pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Selain itu kegiatan *hearing* atau dengar pendapat juga dimaksudkan sebagai tempat untuk menjaring aspirasi, serta masukan dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat untuk memperoleh komunikasi timbal balik atau komunikasi 2 arah yang berkaitan dengan permasalahan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai komponen masyarakat, seperti : tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, media massa, wartawan, dan lain sebagainya.

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat (*hearing*) atau rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Berau selama kurun waktu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau tentang pembahasan terkait dengan Hibah PMI Kabupaten Berau Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2022 ;
2. *Rapat Kerja Gabungan Komisi* DPRD Kabupaten Berau tentang permohonan persetujuan tambahan penghasilan PNS (TPP) Dokter Spesialis di RSUD Talisayan, dan permohonan persetujuan tambahan penghasilan (TPP) ASN Eselon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2022 ;
3. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau tentang Kesultanan Dewan Adat Gunung Tabur yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2022 ;
4. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau tentang pembahasan terkait dengan kerusakan jalan akibat kegiatan PT. Berau Agro Asia (BAA) di Jln. Pembangunan RT. 07, Jln. Nirwana RT. 06 dan RT. 05 Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah, serta pembahasan terkait dengan tingginya *grading* (potongan) pembelian buah sawit oleh PT. Hutan Hijau Mas, PT. Natura Pasific Nusantara, dan PT. Satu Sembilan Delapan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2022 ;
5. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau tentang pembahasan terkait dengan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBD Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022 ;
6. *Rapat Kerja Gabungan Komisi* DPRD Kabupaten Berau tentang pembahasan evaluasi kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2021,

- dan persiapan percepatan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022 ;
7. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau pembahasan terkait dengan pemberhentian dokter di Puskesmas Merapun Kecamatan Kelay yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 ;
  8. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau tentang lanjutan pembahasan terkait dengan permasalahan lahan kelompok tani Bachtiar dengan PT. Supra Bara Energi (PT. SBE) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 ;
  9. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan pemasaran beras lokal yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 ;
  10. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan lanjutan pembahasan permasalahan lahan kelompok tani Bachtiar dengan PT. Supra Bara Energi (PT. SBE) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 ;
  11. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan tindaklanjut hasil sidak DPRD Kabupaten Berau ke PT. Sentosa Kalimantan Jaya (PT. SKJ) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 ;
  12. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan lanjutan pembahasan permasalahan lahan kelompok tani bachtiar dengan PT. Supra Bara Energi (PT. SBE) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2022 ;
  13. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan lanjutan pembahasan

permasalahan lahan kelompok tani karya cipta dengan PT. Supra Bara Energi (PT. SBE) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2022 ;

14. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan operasi minyak goreng bersubsidi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 ;
15. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan harga tanda buah segar (TBS) sawit di Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 ;
16. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan silaturahmi dan perkenalan antara anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau bersama Dinas Sosial Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2022 ;
17. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan tindak lanjut pembahasan mengenai harga tandan buah segar (TBS) sawit di Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2022 ;
18. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan persoalan pengurangan cabor di Porprov ke VII Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022 ;
19. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan penetapan batas wilayah Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022 ;
20. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan keterlambatan pembayaran SHU plasma koperasi da'uyun yang dilaksanakan

- pada tanggal 21 Juni 2022 ;
21. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan dengan penyalahgunaan weweng Kepala Kampung Pilanjau Kecamatan Sambaliung yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2022 ;
  22. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan evaluasi pelaksanaan program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2022 ;
  23. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan rencana kerja Tahun Anggaran 2023 dan evaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2022 PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2022 ;
  24. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan PHK yang dilakukan oleh PT. BUMA Binungan dan PT. HPU Site Long Lanuk Kecamatan Sambaliung yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2022 ;
  25. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan rencana kerja Tahun Anggaran 2023 dan evaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2022 PDAM Tirta Segah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 ;
  26. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan pematangan lahan perumahan korpri Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 ;
  27. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan adanya tumpang tindih

lahan perkebunan agro bisnis dengan lahan perkebunan kelompok tani jarum-jarum besar yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 ;

28. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan lanjutan pembahasan permasalahan lahan kelompok tani bachtiar dengan PT. Supra Bara Energi (PT. SBE) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 ;
29. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan lanjutan pembahasan pematangan lahan perumahan korpri Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 ;
30. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan harga tiket pesawat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 ;
31. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan permohonan hibah ex-Puskesmas Gunung Tabur yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2022 ;
32. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan masa jabatan ketua RT yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2022 ;
33. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan permasalahan BBM bersubsidi di SPBU Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2022 ;
34. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan kelangkaan galian C (pasir, dan lain-lain) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 ;

35. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan penanganan penutupan jembatan sambaliung, dan suplay BBM ke SPBU di 6 kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022 ;
36. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan lanjutan pembahasan pematangan lahan perumahan korpri Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2022 ;
37. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan permasalahan perijinan PT. Berau Agro Asia (PT. BAA) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022 ;
38. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan lanjutan pembahasan permasalahan lahan kelompok tani bachtiar dengan PT. Supra Bara Energi (PT. SBE) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022 ;
39. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan lanjutan pembahasan permasalahan lahan kelompok tani bachtiar dengan PT. Supra Bara Energi (PT. SBE) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022 ;
40. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan lanjutan pembahasan rencana kerja Tahun Anggaran 2023 dan evaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022 ;
41. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan perkembangan

- konservasi penyu di Pulau Blambangan, dan Pulau Sambit yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2022 ;
42. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan rencana kenaikan tarif Perumda Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 ;
43. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan sosialisasi Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022 ;
44. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan sarana infrastruktur latihan pembalap berprestasi di Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2022 ;
45. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan persiapan pelaksanaan Porprov VII Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2022 ;
46. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan penegasan dan pelaksanaan perda tentang pengaturan retail nasional yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2022 ;
47. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan sosialisasi rancangan penataan daerah pemilihan umum Tahun 2024 dan jumlah penduduk di Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2022 ;
48. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau terkait dengan paparan RKAB Perumda Air

Minum Batiwakkal Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 ;

**a. Permasalahan dan Solusi**

**1. Permasalahan**

Alhamdulillah, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat (*hearing*) atau rapat dengar pendapat antara pihak DPRD Kabupaten Berau dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun penyampaian aspirasi selama kurun waktu Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, aman, dan lancar. Tanpa ada kendala yang berarti dilapangan, sehingga tidak ada permasalahan yang berarti.

**2. Solusi**

Agar kiranya untuk pagu anggaran mengenai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat (*hearing*) atau rapat dengar pendapat untuk Tahun Anggaran 2023 dapat ditingkatkan, mengingat banyaknya aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan oleh masyarakat, maupun lembaga lainnya kepada lembaga DPRD Kabupaten Berau.

**4. Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat**

Dalam sistem perencanaan nasional yang termaktub dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan responsive terhadap perubahan, sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang harus ditingkatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD.

Sesuai dengan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Kabupaten/kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah. DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya di jalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi. Melalui ke tiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang di wakيلinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

#### A. Reses

DPRD adalah merupakan lembaga politik yang melaksanakan dan menjalankan fungsinya antara lain : fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi anggaran yang berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran APBD, dan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan kewenangan melaksanakan kontrol didalam

pelaksanaan dan penerapan peraturan daerah (Perda) dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

DPRD juga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan *hearing* atau rapat dengar pendapat, kunjungan kerja dalam daerah maupun luar daerah, pembentuka raperda, dan pelaksanaan kegiatan reses bagi setiap anggota DPRD. Pelaksanaan kegiatan reses dalam 1 tahun masa sidang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan reses. Reses adalah merupakan kegiatan masa sidang dimana para anggota DPRD melaksanakan dan melakukan kegiatan penyerapan aspirasi dengan turun secara langsung kemasyarakat di daerah pemilihan (Dapil) nya masing-masing, menampung aspirasi, dan menjumpai konstituen, serta sekaligus melaksanakan kegiatan fungsi pengawasan yang ada di masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pembangunan, jalannya pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan reses bagi para anggota DPRD Kabupaten Berau selama kurun waktu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. *Pelaksanaan Reses Pertama*, yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 20 Februari 2022, dilaksanakan sebanyak 6 hari ;
2. *Pelaksanaan Reses Kedua*, yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 23 Juli 2022, dilaksanakan sebanyak 6 hari ;
3. *Pelaksanaan Reses Ketiga*, yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 20 November 2022, dilaksnaakan sebanyak 6 hari.

#### **Permasalahan dan Solusi**

- Permasalahan

Alhamdulillah, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT bahwa pelaksanaan kegiatan reses selama kurun waktu Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, aman, dan lancar. Tanpa ada kendala yang berarti dilapangan, sehingga tidak ada permasalahan yang berarti.

- Solusi

Agar kiranya untuk pagu anggaran mengenai pelaksanaan kegiatan reses untuk Tahun Anggaran 2023 dapat ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan reses oleh para anggota DPRD Kabupaten Berau.

B. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

**Jadwal kegiatan Kunjungan kerja dalam daerah :**

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam daerah (kecamatan) yang dilaksanakan para anggota DPRD Kabupaten Berau selama kurun waktu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan) Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau* terkait dengan peninjauan situasi dan kondisi abrasi pantai Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan yang dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 06 Januari 2022 ;
2. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan) Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau* terkait dengan sidak ke stadion mini Olympic Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 ;
3. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau* terkait dengan peninjauan kebun plasma pada PT. Dwiwira Lestari Jaya (PT. DLJ), dan ke Kantor Kepala Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan

- terkait dengan pembangunan di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan yang dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 12 Februari 2022 ;
4. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan)* Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan monitoring jalan Labanan-Segah di Kecamatan Segah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022 ;
  5. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan)* Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pengecekan tata cara Gredding sawit masyarakat di PT. Hutan Hijau Mas di Kecamatan Segah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 ;
  6. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan)* Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan rencana pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS) di Kecamatan Pulau Derawan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 ;
  7. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan)* Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait dengan monitoring satwa yang dilindungi (Penyu) di Kecamatan Pulau Derawan yang dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 02 April 2022 ;
  8. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan)* Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan monitoring dana Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih yang dilaksanakan pada tanggal 06 s/d 08 April 2022 ;
  9. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan)* Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan stadion Olympic mini Teluk Bayur, dan peninjauan air bersih dalam kota yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei

2022 ;

10. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pelayanan warga di Kantor Kecamatan Segah, dan Puskesmas Kecamatan Segah yang dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 04 Juni 2022 ;
11. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan monitoring pembangunan kampung di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung, dan Kecamatan Segah yang dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 04 Juni 2022 ;
12. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan/pengamatan kondisi ekonomi masyarakat pada sektor pariwisata, dan perikanan pasca pandemic Covid-19 di Kampung Tanjung Batu, dan Kampung Pegat Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan yang dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 04 Juni 2022 ;
13. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan kondisi sektor perekonomian masyarakat, dan sektor pariwisata di Kampung Teluk Harapan, dan Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua yang dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 04 Juni 2022 ;
14. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan pembangunan infrastruktur di Kampung Long Laai, dan Kampung Long Ayan Kecamatan Segah yang dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 04 Juni 2022 ;
15. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan

- aktifitas petani, dan komunitas lainnya di Kampung Sido Bangen, dan Kampung Merapun Kecamatan Kelay yang dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 04 Juni 2022 ;
16. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan)* Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan jalan Tubaan, dan peninjauan rencana peningkatan jalan Kampung Tabalar Muara Kecamatan Tabalar, serta peninjauan peningkatan jalan jalur 2 di Biduk-Biduk yang dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 04 Juni 2022 ;
  17. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan)* Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan jalan usiran Kasai Kecamatan Pulau Derawan, dan peninjauan jalan lingkaran Maratua, serta peninjauan permukiman Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua yang dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 04 Juni 2022 ;
  18. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan)* Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan Gg. Rajawali Kecamatan Talisayan, dan pemeriksaan drainase di Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan yang dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 04 Juni 2022 ;
  19. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan)* Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan paket pekerjaan jalan poros Kampung Sido Bangen ke Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay, dan monitoring pengerjaan jalan poros Kampung Long Beliu Kecamatan Kelay yang dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 04 Juni 2022 ;
  20. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan)* Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan proyek multiyears di Kecamatan Tabalar, dan peninjauan proyek pembangunan jalan di Kecamatan Biatan yang dilaksanakan

- pada tanggal 08 s/d 11 Juni 2022 ;
21. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Talisayan, dan Kecamatan Biduk-Biduk yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 Juli 2022 ;
  22. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan monitoring pembangunan kampung di Kampung Harapan Jaya, dan Kampung Tepina Buah Kecamatan Segah yang dilaksanakan pada tanggal 03 s/d 05 Agustus 2022 ;
  23. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan anggaran Kecamatan Batu Putih yang dilaksanakan pada tanggal 03 s/d 05 Agustus 2022 ;
  24. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan peningkatan perekonomian masyarakat Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Agustus 2022 ;
  25. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan peningkatan perekonomian masyarakat Kampung Karang Kecamatan Biatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Agustus 2022 ;
  26. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan peningkatan perekonomian masyarakat Kampung Semurut/Pisang-Pisangan Kecamatan Tabalar yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Agustus 2022 ;

27. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan infrastruktur di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus s/d 02 September 2022 ;*
28. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan) Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan evaluasi pelaksanaan ADK, dan alokasi prioritas ADK untuk pembangunan ekonomi masyarakat kampung di Kampung Merancang Ilir, Kampung Melati Jaya, dan Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur yang dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 10 September 2022 ;*
29. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan potensi perikanan tangkap dan budidaya di Kampung Tanjung Batu, dan Kampung Pegat Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan yang dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 10 September 2022*
30. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan (sidak) ke Kampung Punan Malinau, dan Kampung Long Ayan Kecamatan Segah terkait dengan adanya laporan pencemaran lingkungan oleh PT. Natural Pasifik Nusantara (PT. NPN) yang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 14 September 2022 ;*
31. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan) Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan sarana dan prasarana persiapan pelaksanaan Porprov Tahun 2022 di kantor Sekretariat Porprov Tanjung Redeb yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2022 ;*
32. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah (kecamatan) Anggota Komisi*

- II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat dari sektor perkebunan, dan perikanan di Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih yang dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 07 Oktober 2022 ;
33. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi III Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan pengembangan wisata air panas di Kampung Biatan Bapinang Kecamatan Biatan, dan peninjauan dermaga Bangkuduan di Kecamatan Biduk-Biduk yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 22 Oktober 2022 ;
34. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Ketua DPRD Kabupaten Berau terkait dengan serapan hasil aspirasi masyarakat daerah pemilihan (Dapil) di Kecamatan Tabalar, dan Kecamatan Biatan yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 Oktober 2022 ;
35. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan serapan hasil aspirasi masyarakat daerah pemilihan (Dapil) di Kampung Tabalar Muara, Kampung Tubaan, Kampung Semurut, dan kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 29 Oktober 2022 ;
36. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait peninjauan dermaga Kampung Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan, dan peninjauan jalan menuju pemakaman umum Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan yang dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 05 November 2022 ;
37. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Ketua DPRD Kabupaten Berau, dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan monitoring realisasi penyerahan dan

penggunaan anggaran Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kecamatan Batu Putih, dan peninjauan infrastruktur pembangunan sarana serta prasarana pelabuhan Biduk-Biduk di Kecamatan Biduk-Biduk yang dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 05 November 2022 ;

38. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau ke Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua terkait kesiapan venue Porprov yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 November 2022 ;
39. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait dengan sosialisasi minat baca masyarakat Kecamatan Maratua yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 November 2022 ;
40. *Kunjungan Kerja Dalam Daerah* (kecamatan) Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau, dan Anggota DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan peninjauan sarana dan prasarana pembangunan SMAN 8 Berau di Kecamatan Biduk-Biduk yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 Desember 2022 ;

### **Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan**

Alhamdulillah, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT bahwa pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam daerah (kecamatan) selama kurun waktu Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, aman, dan lancar. Tanpa ada kendala yang berarti dilapangan, sehingga tidak ada permasalahan yang berarti.

## 5. Fasilitasi Tugas DPRD

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 terdapat permasalahan atau kendala, antara lain :

### 2.7 Realisasi Anggaran

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang merupakan realisasi belanja menurut program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau sampai akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp.64.986.812.298 atau 85.38 % dari pagu anggaran Rp. 75.885.464.162, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.10.898.651.864 atau 14.62 % yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel  
Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA Sekretariat DPRD  
Kabupaten Berau Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Sekretariat DPRD	75.885.464.162	64.986.812.298
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.140.731.718	45.247.451.958
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	159.391.700	3.060.000
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	116.891.800	2.040.000
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.499.900	1.020.000
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.832.104.669	8.796.618.327
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.397.023.957	6.869.966.455
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.435.080.712	1.928.651.872
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.719.700.400	367.683.270

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2022

1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	304.720.000	294.656.430
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.259.980.400	0
3	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	155.000.000	73.026.40
4	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>3.350.736.800</b>	<b>2.965.254.932</b>
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	68.040.000	55.783.000
2	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	1.260.191.200	1.290.859.000
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	155.044.600	148.884.114
4	Penyediaan bahan logistik kantor	485.030.000	329.049.365
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	246.683.000	244.681.750
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	99.999.600	78.849.700
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.035.748.400	817.148.003
5	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.881.766.300</b>	<b>1.761.066.765</b>
1	Penyediaan surat menyurat	4.459.800	1.620.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	803.040.000	696.213.265
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	298.227.400	291.203.900
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	776.039.100	772.029.600
6	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.550.163.200</b>	<b>2.323.417.408</b>
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1.071.384.500	879.747.201
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	283.584.200	271.862.910
3	Pemeliharaan /rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	1.028.274.500	1.013.437.297
4	Pemeliharaan asset tetap lainnya	166.920.000	158.370.000
7	<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>	<b>23.586.015.349</b>	<b>22.459.617.167</b>
1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	22.661.713.149	21.876.362.44
2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD27	271.852.400	250.054.000
3	Pelaksanaan medical check up DPRD	652.449.800	333.200.323
8	<b>LAYANAN ADMINISTRASI DPRD</b>	<b>6.831.623.300</b>	<b>6.387.168.589</b>
1	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	4.925.889.000	4.555.299.414

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2022

2	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	1.905.734.300	1.831.869.175
II	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	25.744.550.044	19.739.360.340
1	<b>PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD</b>	4.074.216.700	2.367.536.678
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	4.074.216.700	2.367.536.678
2	<b>PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN</b>	2.839.020.300	2.282.181.150
1	Pembahasan KUA dan PPAS	100.989.600	85.769.600
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.989.600	30.680000
3	Pembahasan APBD	1.779.066.200	1.555.426.577
4	Pembahasan APBD Perubahan	564.992.200	515927.073
5	Pembahasan Laporan semester	42.989.000	5.070.000
6	Pembahasan pertanggungjawaban	249.993.700	89.307.900
3	<b>PENINGKATAN KAPASITAS DPRD</b>	7.131.565.744	6.152620.408
1	Orientasi DPRD	20.000.000	0
2	Pendalaan Tugas DPRD	2.336.418.000	1.896.022.086
3	Publikasi dan dokumentasi dewan	3.187.779.300	3.157.614.660
4	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	199.996.600	83.425.500
5	Penyediaan tenaga ahli fraksi	458.928.444	452.657.176
6	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	579.868.300	405.078.070
7	Penyusunan program kerja DPRD	348.575.100	157.822916
4	<b>PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT</b>	5.139.903.200	3.643.140.814
1	Kunjungan kerja dalam daerah	729.977.700	297.441.400
2	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	24.999.300	12.044.300
3	Pelaksanaan reses	4.384.926.00	3.351.655.114
5	<b>PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD</b>	319.559.300	186.588.961
1	Pengawasan kode etik DPRD	319.559.300	186.588.961
6	<b>FASILITASI TUGAS DPRD</b>	6.240.285.200	5.107.292.329
1	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	4.700.019.500	4.055.838.744
2	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	1.143.931.900	720.785.105
3	Fasilitasi tugas impinan DPRD	396.333.800	330.668.480

Saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 59.843.811140.80 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22  
Rincian Aset SKPD

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Keterangan
1.	Aset tetap	60.344.145.903	62.559.343.615	2.215.197.712	Naik
2.	Aset lainnya	6.648.885.360	6.648.885.360		Turun
	Jumlah	66.993.031.23	69.208.228.975	2.215.197.712	



#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Penyusunan LKj-IP ini dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari bagian-bagian yang secara langsung menangani program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2022.

Dalam pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022, tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan perbaikan kinerja OPD di tahun mendatang.